ROHINGYA (1)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Perkembangan baru Rohingya boleh dikatakan semakin tak menentu. Salah satu indikatornya ialah kegagalan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan PBB yang diketuai oleh Marzuki Darusman dari Indonesia.

Dalam video yang baru ditayangkan oleh kantor berita Antara, dengan wajah tak terjejak Marzuki Darusman melaporkan timnya tak bisa berbuat apa-apa, bahkan memasuki Myanmar pun tidak bisa. TPF dibentuk oleh PBB pada bulan Maret, tetapi komposisinya baru tersusun bulan Juli dan efektifnya baru mulai bekerja akhir Agustus. Memang hingga kini TPF telah mengirim tim pendahulu ke Negara tetangga Bangladesh, karena belum dimungkinkan untuk masuk ke Myanmar.

Bagi Marzuki Darusman pengertian menjangkau Myanmar itu relatif. Dalam artian sempit ialah masuk ke Myanmar, tetapi pengertian yang lebih luas dari itu ialah bahwa TPF mempunyai akses kepada korban, hanya karena begitu banyak orang yang akhirnya bisa selamat keluar dari Myanmar dan bisa bercerita tentang apa yang terjadi khusus di Rakhin. Jadi TPF hanya berada di Bangladesh menanyai pengungsi yang tersakiti dan jumlahnya kini bisa mencapai sekitar 400.000 orang lebih. Oleh karena itu TPF tentu tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang lebih terpercaya tentang kejadian buruk di Myanmar. Padahal TPF diberi mandat hanya sampai bulan Maret tahun depan.

Atas pertanyaan seorang jurnalis, Marzuki Darusman berpendapat bahwa apa yang akan dilakukan oleh TPF ke depan tergantung dari keputusan Dewan HAM apakah ini akan dilaporkan ke Dewan Keamanan untuk diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional atau bisa juga bahwa Dewan HAM menyimpulkan dibentuk satu mekanisme juridis untuk melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan.

Tetapi yang jelas bahwa mandat dari TPF ini adalah untuk mempersiapkan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang jika tuntutan terjadi harus diselesaikan secara hukum. Kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran berat ini maka awal mula yang lalu menjadi sandaran berprinsip bahwa masalah ini diselesaikan oleh Negara yang bersangkutan walau pun itu pelanggaran HAM berat. Itu dimungkinkan. Diselesaikan oleh Myanmar. Ini sangat tidak menggembirakan sama sekali. TPF tidak efektif.

Melihat ke belakang

Kita ingat konflik berkepanjangan ini mulai menahapi kekerasan fisik yang meluas pada bulan Juni 2012. Eskalasi berlangsung hingga tahun 2013, dan tidak kunjung reda hingga kini. Melihat kenyataan empiris itu, agaknya tak seorang bisa memberi jaminan apakah nanti akan terjadi hal lebih buruk melebihi yang pernah terjadi, terutama jika pemerintah negeri diskriminatif ini tak diberi ganjaran keras oleh mekanisme internasional.

Banyak opini menyebutkan konflik ini sebagai konflik biasa belaka, yaitu antara sebuah etnis minoritas yang kebetulan beragama Islam dengan mayoritas yang kebetulan beragama Buddha. Konflik serupa ini ada di mana-mana, kata mereka, dan dianggap tidak begitu istimewa. Begitu kira-kira kesimpulan yang ingin ditawarkan. Opini seperti itu menguat, dan di Indonesia bahkan sedang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu menjadi *mainstream*. Semakin aneh lagi, desakan meminta Negara untuk bersikap tanggap telah diidentifikasi

sebagai “penggorengan politik” untuk menyudutkan Negara, khususnya Presiden Joko Widodo. Sebuah sikap yang wajib dicurigasi hanya bisa muncul dari watak barbar, dan sangat bertentangan dengan klaim kosong selama ini “saya Indonesia saya Pancasila”.

Pada lain pihak, umumnya para pemimpin dan komunitas Buddha di Indonesia, sebagai salah satu komunitas minoritas yang secara akal sehat memang akan cukup terganggu dengan kasus Rohingya ini, berusaha memilah sedemikian rupa. Bahwa kejadian buruk itu secara normatif dianggap terklasifikasi dalam ranah tertentu, bukan dalam ranah agama, dan tak merepresentasikan watak umat mereka seluruhnya. Arahnya jelas, semoga tak ada sikap yang tak bersahabat dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia, dan memang itu sebaiknya tak perlu terjadi. Umat Islam Indonesia dan dunia pun mestinya bersikap seperti itu selagi norma kemanusiaan masih dihargai.

Ini Konflik Agama

Konflik ini sangat sukar untuk tidak diidentifikasi sebagai konflik agama. Dokumen Human Right Watch (2013) yang diberi judul “All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State” mengutip dialog seorang Rohingya dengan seorang tentara yang dimintai tolong dan perlindungan dari keganasan yang tak terperikan.

Laporan ini mencatat ucapan tentara, demikian: “The only thing you can do is pray to save your lives” (Tak ada yang dapat kau lakukan kecuali hanya berdo’a untuk keselamatanmu). Ini sekaligus mengindikasikan sebuah penghinaan terhadap agama yang dianut oleh si Rohingya yang teraniaya itu. Kira-kira tentara itu akan memaksudkan “jika Tuhanmu ada, suruh dia menyelamatkanmu dari orang-orang Buddha ganas ini”.

Yakin atas keterlibatan institusi resmi, dokumen Human Right Watch ini kemudian merekomendasikan agar segera, dan secara tidak memihak, menyelidiki orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius ini dan menuntut mereka secara adil sampai tingkat tertinggi, terlepas dari pangkat atau jabatannya. Juga sangat perlu diteruskan dengan pembentukan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki pelanggaran (berat) hukum hak asasi manusia. Bandingkan hasil cakap-cakap TPF yang dipimpin oleh Marzuki Darusman itu.

Dokumen Human Right Watch ini juga merekomendasikan secara kuat revisi undang-undang untuk memastikan negara menjunjung tinggi hak Rohingya dan Muslim lainnya, sembari segera menghapus semua pembatasan kebebasan bergerak populasi Rohingya. Undang-undang Kewarganegaraan 1982 wajib menghilangkan ketentuan yang diskriminatif atau semangat yang memiliki dampak diskriminatif terhadap penentuan kewarganegaraan karena alasan etnisitas, ras, agama atau status yang (seyogyanya) terlindungi lainnya. Semua itu memerlukan transisi yang sekaligus kondisi tertentu seperti penyediaan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terhalang untuk badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional ke semua populasi di Negara bagian Arakan. Perhatikan ketajaman rekomendasi ini, dan bandingkan dengan cakap-cakap Marzuki Darusman.

Kelihatannya rekomendasi itu tidak pernah terlaksana. Mekanisme internasional juga macet. Di berbagai Negara ada yang meminta perhatian ASEAN, misalnya agar solidaritas yang selama ini didengungkan keras dapat didayagunakan. Rupanya ASEAN tak memiliki nurani untuk hal semacam ini. Mungkin para pemimpin Negara-negara ASEAN hanya ingin berbicara ekonomi dan mereguk keuntungan atas hasil siasat dan tipu daya sesama dalam

arus dan semangat globalisasi yang dipaksakan untuk memihaki siapa yang perkasa dan itu tentu sekaligus amat mencemaskan. Agaknya, ASEAN titik sampai di situ.

Konflik ini benar-benar berbasis sentimen agama juga dioperoleh dari narasi N. Morada dalam “ASEAN, The Rohingyas And Myanmar’s Responsibility To Protect” (Vol. 2 No.9, 2012). N.Morada mencatat serius bahwa target penyerangan orang-orang Buddha tidak hanya orang-orang muslim dari etnis Rohingya saja, tetapi juga orang-orang muslim dari suku lain seperti Kaman (Kamein). Meski tak sedahsyat derita Rohingya, laporan Mang Suan Kim “Religious Persecution In Myanmar Persists Despite Reforms” menjelaskan bahwa penganut agama Kristen juga tak luput dari sasaran kekejaman di Myanmar. Di Negara Bagian Chin populasi mayoritas Kristen menghadapi tantangan dan pembatasan-pembatasannya sendiri yang benar-benar menyulitkan. Tidak ada perbaikan dalam hal kebebasan beragama kecuali bagi Buddha. Pihak berwenang bahkan menghancurkan salib selama rezim militer dan terus melakukannya atas perintah instansi pemerintah. Di Karen, orang-orang Kristen mendapat ancaman dari nasionalis Buddhis yang bahkan dengan arogan membangun pagoda ilegal di halaman gereja. Ya, di halaman gereja.

Konferensi Waligereja Myanmar yang terdiri dari berbagai komisi, agensi, dewan dan badan lainnya yang beranggotakan 16 keuskupan di Myanmar, atas kekerasan anti-Muslim tahun 2013, memberanikan diri mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendesak pemerintah untuk melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak-hak agama semua, terutama komunitas minoritas.

Semua orang mestinya menyadari bahwa manusia adalah aset terbesar yang memiliki Tuhan yang diberikan hak untuk pembangunan penuh yang difasilitasi oleh pendidikan gratis dan wajib. Bangsa ini telah dilukai oleh penolakan untuk menerima hak tradisional semua kelompok masyarakat adat, yang tinggal selama beberapa generasi di negara ini. Upaya-upaya politik untuk mengenali keunikan mereka, hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, hak pengelolaan sumber daya tidak berkelanjutan dalam sejarah Myanmar, yang memaksa penderitaan karena perang, konflik, perdagangan manusia, ancaman narkoba dan lain-lain.

Kemuliaan Buddhisme, begitu Konferensi itu menyindir, sebagaimana diucapkan dalam prinsip metta dan karunia yang bersinar, diperkuat melalui kata-kata belas kasih, cinta untuk orang-orang yang rentan dan menyambut semua sebagai saudara dan saudari, seolah tanpa bekas sama sekali. Konferensi sangat mengutuk kegiatan kekerasan para fundamentalis Buddha.

Bagi Konferensi ini berkah Tuhan untuk Myanmar berupa sumber daya alam harus dilindungi dan tidak dibuka untuk eksploitasi internasional. Hilangnya tanah petani miskin, konsesi lahan hingga kepentingan korporasi meminggirkan orang miskin yang semua itu memerlukan penegakan hak. Keanekaragaman agama adalah kekuatan Myanmar dan untuk mencairkan hak fundamental ini semua kekuatan buruk yang menghalangi harus dilawan oleh semua pihak.

Penulis dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)

ROHINGYA (2)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Ada hal yang amat spesifik dalam setiap konflik agama. Banyak pakar telah memberi pandangannya tentang ini. Secara akumulatif setiap konflik berbasis agama kerap menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas (*ethno-religious conflict*) sebagaimana dijelaskan oleh J. Fox (2002) dalam karyanya *Ethnoreligious Conflict in the Late Twentieth Century: A General Theory* dan S.A. Kadayifci-Orellana (2009) yang dimuat dalam *Ethno-religious conflicts: Exploring the role of religion in conflict resolution*.

Ho-Won Jeong (2008) dalam “Understanding Conflict and Conflict Analysis” kiranya dapat menjadi sebuah pengantar yang lebih memudahkan pemahaman bahwa sejatinya sifat konflik serupa ini pasti akan selalu sangat sulit diselesaikan, dan durasinya pasti pula dapat sangat lama. Mengutip Brown (1988), Ho-Won Jeong juga meyakini bahwa seyogyanya memang norma membimbing individu di wilayah kehidupan sosial termasuk yang asing baginya, sekaligus selalu berfungsi sebagai “rambu-rambu” yang membingkai. Sedangkan sistem kepercayaan memengaruhi cara menafsirkan perilaku orang lain dan situasi-situasi yang timbul dalam interaksi sesama umat manusia.

Sudah pastilah perbedaan nilai akan berujung pada mekanisme tertentu mengungkapkan variasi dalam preferensi sikap dan tindakan. Prinsip-prinsip yang melekat pada pembelahan utama ideologi atau cara hidup akan sekaligus kerap merasionalisasi standar dan metode alokasi sumber daya. Di pihak lain, kepercayaan itu sendiri selalu mendasari ekspresi dari orientasi masyarakat, sekaligus secara kuat melegitimasi perilaku kelompok, dan sering didefinisikan dalam hal kepercayaan dan perspektif yang dimiliki tentang diri dan orang lain.

Dalam kasus-kasus konflik agama yang tak melibatkan isu etnis secara lebih khusus seperti antara Katholik dan Protestan saja begitu sulit beroleh penyelesaian, apalagi yang melibatkan etnis seperti yang menimpa Rohingya. Karena itu masuk akal jika Sandy Nur Ikfal Raharjo (2015) mengidentifikasi sama konflik Rohingya dengan konflik panjang Israel-Palestina yang melibatkan komunitas mendunia antara Islam dengan Yahudi, konflik Irlandia Utara antara Katholik dan Protestan, konflik Kashmir antara Islam dengan Hindu, konflik di Filipina Selatan antara Islam dengan Katholik, dan konflik di Thailand Selatan antara Islam dengan Buddha.

Sesuatu telah terjadi begitu alamiah dalam hal populasi agama. Kecemasan Buddha Myanmar mungkin terkait dengan populasi yang meningkat hampir semua agama “rivalnya”. Pertambahan jumlah itu terlihat amat jelas. Tahun 2013 tercatat lebih dari 3 juta orang Kristen di Myanmar, yang berarti 6,2 % dari total populasi. Sedangkan pada tahun 1983 jumlah itu hanyalah berkisar 4,9 %. Dengan cara pandang yang sama (faktor sentimen agama sebagai penyebab utama konflik), tentulah tidak menjadi aneh jika konflik Rohingya juga dianggap memiliki kesamaan tertentu dengan sejumlah konflik lainnya yang hingga kini belum terselesaikan, yakni konflik Kristen-Islam di Republik Afrika Tengah dan Nigeria. Kelompok-kelompok etnis yang terlibat dalam konflik akan lebih sukar diajak ke sebuah kesepakatan damai karena mereka tidak hanya berbeda etnis, melainkan juga berbeda agama.

Pendekatan

Pendekatan yang serupa dengan tawaran simpatik dari Sandy Nur Ikfal Raharjo (2015) mungkin akan lebih memudahkan pemahaman atas anatomi konflik ini. Menurutny ada 3

jenis isu terpenting yang *inheren*, yakni *trigger factor* (pemicu), *accelerator factor*, dan *structural factor*. Ketiganya tak hanya sekadar wujud tunggal, melainkan masih memiliki pencabangan-pencabangan yang memerlukan identifikasi. Semangatnya ingin menegaskan di sini bahwa ada sebuah kondisi struktural yang menyejarah dan begitu rumit yang ibarat api dalam sekam menjadi muncul terbuka ke permukaan ketika ada faktor pemicu yang memadai dan konflik ini beroleh dukungan faktor-faktor akselerator yang begitu kuat hingga pada giliran berikutnya begitu rumit untuk ditanggulangi.

Dalam ruang dan kesempatan yang terbatas ini kita akan coba telaah satu persatu. *Pertama*, *trigger factor* (pemicu). Masih ingatkah adanya tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang mendadak sontak menimbulkan kemarahan itu? Sebagaimana dilaporkan dalam *Human Right Watch* tahun 2013, isu berkembang begitu cepat dan segera menimbulkan kemarahan besar bagai bolai salju. Bahwa pelaku kejahatan (diduga) adalah 3 orang laki-laki Muslim. Jangan lupa bahwa pada tahap ini sebetulnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan seharusnya diperlakukan dalam ranah kriminal murni, sebagaimana hukum mengaturnya.

Namun tanpa terbendung kasus ini telah diseret ke ranah yang lebih kompleks dan jauh lebih berbahaya, yakni dengan memasukkan elemen identitas agama ke dalam kasus. Akhirnya muncul kesimpulan politik “perempuan Buddha” yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan oleh pelaku “laki-laki muslim”.

Tahun lalu di Medan ada kejadian yang diberitakan oleh media bahwa seorang petugas kepolisian ditempeleng oleh seorang pria dari etnis tertentu saat petugas itu melakukan tugas resmi dengan seragam resmi pula. Para aktivis tak begitu peduli pada awalnya, kecuali setelah berlangsung sekian lama kejadian itu tidak juga diproses hukum secara normal. Sebuah solidaritas yang mekanistik muncul. Beberapa aktivis mendatangi pihak berwenang dengan mengajukan semacam ultimatum bahwa jika pria penista petugas kepolisian itu tidak segera diproses hukum, justru para aktivis yang akan melakukannya dengan cara sendiri, atau paling tidak menjemputnya ke kediamannya untuk diserahkan kepada pihak berwajib.

Para aktivis sangat tersinggung salah satu simbol Negara (kepolisian) telah dihinakan. Mereka sadar betul bahwa oknum kepolisian bisa saja memiliki perilaku aneh dan tak setia *conde of conduct* dalam menjalankan tugas. Tetapi jika petugas kepolisian yang sedang bertugas ditempeleng, itu artinya Negara sudah dihinakan. Bertambah lagi kecurigaan tentang pengistimewaan terduga pelaku karena tak diproses hukum selayaknya. Saya tidak perlu meneruskan gambaran sentimen yang membara di sini terkait dengan posisi si pelaku.

Kedua, accelerator factor. Jauh sebelum kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini perdebatan sengit terkait isu orang-orang Muslim Rohingya apakah bagian dari etnis asli Myanmar atau bukan, telah terjadi secara nasional di Myanmar. Bagi yang pro-Rohingya dengan lapang dada dapat menerima mereka sebagai penduduk asli Myanmar yang sudah menempati wilayah Rakhine, jauh sebelum era kolonisasi Inggris. Rohingya dianggap memiliki hak penuh sebagai salah satu kelompok etnis dengan hak kewarganegaraan yang penuh. Sembari membahas Rohingya, tak salah memperbandingkan dengan kisah Indonesia dengan para minoritasnya yang datang berduyun-duyun dan menguasai ekonomi. Begitu pun minoritas yang memihaki penjajah saat negeri ini belum mampu merdeka.

Dalam kasus di Myanmar Tin Maung Maung Than & M.Thuzar (2012) dalam *Myanmar's Rohingya Dilemma* dengan sangat baik berusaha menjelaskan bahwa pemerintah dan

kelompok mayoritas yang terlanjur menjadi anti-Rohingya tetap bersikukuh menolak bahwa mereka ini adalah imigran Bengal yang datang setelah Perang Anglo-Burma (1824) yang tidak berhak mendapatkan status kewarganegaraan.

Rupa-rupanya ada faktor yang memicu kecurigaan lainnya, yakni peningkatan populasi Muslim Rohingya yang konon terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Tentang peningkatan populasi ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, populasi Kristen dan Katolik pun sebetulnya juga mengalami hal sama. Implikasinya berlanjut ke bidang ekonomi. Persaingan yang merembes ke arena ekonomi dan bisnis ini tidak selalu disadari telah merubah keadaan, seperti penguasaan lahan dan lain-lain, sebagaimana diterangkan T.J. Waluyo (2013) dalam karyanya yang diterbitkan oleh Jurnal Transnasional (Vol. 4 No. 2, 838–852) berjudul "Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar".

Ketiga, structural factor. Telaah sejarah tiba pada sebuah kesimpulan bahwa konflik di Rakhine pada tahun 2012–2013 itu sebenarnya hanyalah merupakan titik kulminasi saja dari serangkaian kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak tahun 1962 yang dilakukan secara sistematis. Bayangkan Negara menganggap perlu melakukan pemisahan tempat tinggal warga muslim dengan warga mayoritas Buddha (Jason Szep, Andrew R.C. Marshall, Special Report: Witnesses tell of organized killings of Myanmar Muslims, November 12, 2012/ 4:04 AM), juga praktik perampasan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, selain kebijakan tidak memberi status warga negara bagi orang-orang Muslim Rohingya.

Bagaimana membayangkan proses-proses sosial, hukum dan politik untuk mengantarkan sebuah kemasuk-akalan di negeri itu tentang adanya kebijakan yang mengharuskan minoritas Rohingya untuk membayar ketika ingin mengunjungi desa tetangga? Bisakah dibayangkan letak kewajiban larangan bagi Muslim Rohingya untuk melakukan perjalanan ke lebih dari tiga kota sekaligus? I.G.Robinson dan I.S. Rahman (2012) dalam *The Unknown Fate of the Stateless Rohingya* yang termuat pada *Oxford Monitor of Forced Migration* (Volume 2, Number 2, 16–20) menjelaskan bahwa etnis minoritas ini juga secara sistematis dibatasi aksesnya terhadap pendidikan tingkat kedua dan ketiga serta layanan-layanan publik lainnya.

Cara pandang mayoritas Buddha membentuk memori kolektif yang kuat sebagai hasil praktik diskriminasi Negara terhadap orang Islam minoritas yang tak ayal melahirkan stereotip-stereotip negatif. B.Zawacki mencatat dalam *Defining Myanmar's 'Rohingya Problem'* bahwa sebetulnya konflik komunal warga Buddha dengan warga Muslim tidaklah terjadi hanya pada tahun 2012–2013, tetapi juga pernah pada tahun 1978, 1992, 2001, dan 2009. Dinamika konfliktual yang meluluh-lantakkan Rohingya ternyata sudah demikian kuat memupuk penempatan identitas agama sebagai acuan solidaritas. Telah menjadi kelaziman mayoritas mengistimewakan orang-orang dari kelompoknya yang beragama Buddha, dan demikian pula sebaliknya. Perasaan *in-group* dan *out-group* ini bahkan memandang orang luar kelompok (*out-group*) tak hanya sebagai pesaing belaka, melainkan musuh yang mengancam.

Dalam situasi hegemonik dan situasi konflik asimetris demikian itu membunuh Muslim Rohingya bagi sebagian kaum Buddha dapat saja dimaknai sebagai *moral-religious obligation* yang terpuji sesuai kristalisasi pandangan bahwa mereka adalah musuh yang sangat berbahaya. Doktrin itu menguat.

Penulis dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)

ROHINGYA (3)

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Kemana Nobel Perdamaian dan penerimanya? Mengapa ia diam saja? Apa yang ditunggunya gerangan? Aung San Suu Kyi mungkin terjepit antara ingin dukungan mayoritas Buddha dan Negara yang sudah terlanjur bertindak demikian tak adil dan bahkan melampaui batas nalar kemanusiaan terhadap Rohingya.

Oleh B.O'Brien dalam analisisnya *Buddhism in Burma (Part 2: Buddhist-Muslim Violence)* menyebutkan bahwa pelibatan isu agama dalam konflik ini sengaja dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk memosisikan pemimpin defacto Aung San Su Kyi dalam dilema. Mudah sekali untuk difahami bahwa jika saja ia mendukung perlindungan terhadap orang-orang Muslim, maka dukungan orang-orang Buddha sebagai mayoritas terhadapnya akan runtuh. Memilih sikap diam saja, seperti sekarang, maka resikonya jauh lebih kecil untuk kekuasaan meski pun mendapat kecaman dari para aktivis HAM. Tetapi itu sama sekali tak terpuji. Ia tidak boleh seperti itu, sambil berapologi kemana-mana.

Universitas Oxford mencopot lukisan diri pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ini dan dinyatakan akan segera kehilangan gelar kehormatan yang ia dapat dari dewan kota di Tenggara Inggris. Keputusan itu diambil atas persetujuan lintas partai yang menyimpulkan bahwa Suu Kyi sudah tidak pantas menyandang gelar kehormatan Freedom of Oxford yang diberi pada 1997. Aung San Suu Kyi dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, terutama terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Ia tidak vokal untuk melindungi negaranya sendiri.

Dalam mengambil tindakan ini Oxford menyatakannya sebagai ungkapan suara nurani yang ikut menyerukan keadilan dan pemenuhan HAM bagi orang Rohingya. Juga untuk menghormati tradisi Oxford, sebagai kota yang beragam dan manusiawi agar tidak tercoreng dengan orang-orang yang menutup mata pada kekerasan.

Memang para pemimpin pemerintahan dan keagamaan negeri ini kurang menghitung secara komprehensif dampak perlakuan kekerasan yang sudah pasti mencoreng reputasi agama Buddha dalam catatan peradaban sebagaimana dijelaskan oleh A.Strathern dalam *Why are Buddhist Monks Attacking Muslims?*”, yang dipublikasi oleh BBC New Magazine (2013). A.Strathern menilai para biksu dan penganut Buddha tak lagi bisa dikenali sebagai cinta damai, justru menjadi tertuduh pelaku kekerasan. Ashin Wiratu lebih perkasa, baginya Negara harus tunduk titah, dan dunia (Nobel Perdamaian) bukanlah sesuatu di negaranya.

Para pemimpin politik di berbagai Negara memang kerap terjebak dalam situasi sulit tanpa pilihan yang bersifat solusional. Umumnya mereka tiba pada sebuah kondisi yang tak mudah menentukan lebih penting mana kelestarian kekuasaan politik dibanding kewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyat yang sebetulnya justru wajib ditempatkan sebagai cita-cita suci perjuangan politik dan ekspresi kekuasaan. Tetapi sebaliknya fakta-fakta menunjukkan bahwa mereka kerap lebih mencari cara tersamar untuk mengeksploitasi masalah untuk kepentingan kelestarian kekuasaan ketimbang memenuhi kewajiban normative dan moral kekuasaan politik. Banyak contoh untuk hal ini, di dalam maupun di luar negeri yang untuk nyamannya tak usahlah disebut.

Sikap Indonesia

Selain Natalius Pigai, saya mencermati seruan Emerson Yuntho yang disampaikan awal bulan ini berjudul “Etnis Rohingya Dibantai, Pemenang Nobel Perdamaian Diam saja”. Ia menegaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, dikabarkan bahwa militer Myanmar di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi melakukan pembantaian besar-besaran kepada warga Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar. Menurut laporan yang ada, warga Muslim Rohingya dikabarkan dibunuh dan disiksa secara fisik.

Perempuan dan anak-anak juga merupakan korban dari pembantaian tersebut. Data dari *European Rohingya Council (ERC)* menyebutkan bahwa 3.000 Muslim Rohingya terbunuh selama tiga hari, pada tanggal 25-27 Agustus lalu. Desa tempat mereka tinggal pun dibakar. Militer pemerintahan berdalih bahwa ini merupakan upaya memberantas terorisme.

Hingga detik ini, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negerinya itu. Akibatnya, kini banyak warga Muslim Rohingya yang mengungsi dan terdampar di perbatasan Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) melaporkan sedikitnya 18.445 Muslim Rohingya yang mengungsi (bbc.com).

Namun, Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian seakan tuli dan tidak melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya. Kami meminta semua orang yang mencintai perdamaian dan menentang kekerasan dan pembunuhan terhadap etnis Rohingya untuk mendukung dan memperkuat petisi ini.

Meski pihak tertentu menilai bersifat internal suatu negara, konflik yang menasar target pemusnahan Rohingya di Myanmar memiliki pengaruh yang sangat dirasakan di Indonesia serta di negara tetangga dan sekawasan lainnya. Oleh karena itu pendapat simplistik yang menganggap “itu bukan urusan kita” atau “Indonesia saja penuh masalah, konon lagi mau memerhatikan konflik Negara lain”, tak cuma memupuk sikap ketak-pedulian yang tak wajar, melainkan juga pengabaian nilai-nilai humanitas.

Keterbelahan orang Indonesia (minoritas di satu pihak dengan akses media yang luar biasa dengan mayoritas di pihak lain (dengan segenap keterbatasannya) sebetulnya secara umum mencerminkan bahaya internal yang tak ubahnya api dalam sekam. Indonesia sangat rapuh, serapuh kerupuk siap santap di meja makan. Mengeluhkan penderitaan Rohingya dianggap menggoreng masalah untuk kepentingan merongrong kekuasaan jelas sebuah tuduhan tak terperikan. Mudah-mudahan saja mayoritas masih saja mampu mengelus dada sambil memperbaharui cara pandangnya yang lebih dewasa untuk Negara dan bangsa yang bersejarah panjang ini (Indonsia).

Sebagian rakyat Indonesia berharap bahwa meski memang Myanmar bukan Indonesia, dengan fakta bahwa mereka di sana katakanlah tak sempat mendapat pengajaran tuntas dari Bung Karno tentang Pancasila, tetapi Indonesia tidak boleh bersikap minimalis. Implementasi Aku Indonesia Aku Pancasila sebetulnya sangat bermanfaat untuk ikut aktif menyelesaikan konflik ini. Bagaimana mungkin pemahaman Pancasila yang benar tak peduli kemanusiaan yang adil dan beradab?

Orang Indonesia, apalagi para pemimpinnya, seyogyanya lebih maju dalam pemahaman bahwa gerakan separatis etnis atau agama, yang diselenggarakan, misalnya oleh Karen dan Arakan dari Burma, Mindano Filipina, Aceh Indonesia, dan Patani dari Thailand, kesemuanya tercatat telah membentuk perlawanan militer (Minahan, 2002). Itu lazim saja. Tetapi semua itu dapat terjadi justru berakar pada keadilan minimum yang tak terjamin. Tidak masuk akal sebuah gerakan separatis yang beresiko besar dideklarasikan untuk separatisme itu sendiri. Harus ada alasan kuat dan mendasar untuk itu. Pokok-pokok pikiran Minahan (2002) berikut ini akan digunakan untuk memperjelas masalah.

Dari berbagai sumber konon diketahui bahwa di republik Chechnya yang terkenal kaya minyak itu, dan terutama oleh para pemimpin muslim tercatat pernah gagal dalam rangkaian gerakan memisahkan diri dari Rusia. Mereka di sana terus-menerus mengalami penindasan militer atas nama negara. Perang separatis juga bisa menambah kerumitan dalam masalah-masalah terkait perbatasan internasional. Misalnya, dalam rangka menghalangi gerakan nasionalis Kurdi yang konon adalah sesuatu yang demikian tersebar di Turki, Irak, dan Iran, kampanye militer yang dilancarkan oleh Turki secara jelas menargetkan pejuang Kurdi dengan serangan ke Irak Utara sejak tahun 1990an. Di belahan lain tercatat bahwa spillover lintas batas seperti ini juga demikian jelas terlihat di republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Burundi, yang secara faktual kelompok etnisnya membentangi di perbatasan negara bagian.

Bagaimana menjelaskan semua ini? Bahwa ketika otonomi politik minoritas nasional dikekang sedemikian rupa, maka Negara-negara tetangga yang berdekatan dapat terlibat langsung dalam konflik tersebut. Penindasan Hungaria di Slovakia dan perlakuan terhadap orang Rusia di Estonia, Lithuania, dan Ukraina misalnya, terbukti telah menghasilkan ketegangan yang mendidihkan kondisi politik antara negara tuan rumah kelompok minoritas dan negara-negara yang berdekatan dengannya. Konflik trans-negara juga tidak dapat dielakkan jika sebuah kelompok nasionalis di wilayah sub-negara bergabung dengan negara tetangga yang memiliki agama, bahasa, dan aspek tradisi budaya yang sama. Meskipun pemulihan perlu dilakukan dengan perubahan institusional, kekhawatiran atas kedaulatan dan integritas teritorial telah merusak pemisahan diri.

Indonesia mestinya menyuarakan kemandirian Rohingya sebagai bangsa dengan Negara sendiri di Myanmar. PBB dan Negara-negara yang masih memiliki nurani wajib mendorong dan segera mengakui Negara Rohingya. Hanya itu solusi.

Penulis dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)